

Dinamika Koalisi dan Efektivitas Kepemimpinan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto

Suyati^{1*}, Budiyo¹

¹ Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

✉ suyati@mhs.unsoed.ac.id*

Abstract

This study examines the dynamics of political coalition formation during the presidencies of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), and Prabowo Subianto, as well as the tendency of their administrations to expand the scope of political party coalitions. The Reform era and amendments to the 1945 Constitution limited presidential authority, making political support from parties in the House of Representatives (DPR) crucial for governmental stability. SBY, Jokowi, and Prabowo established broad and pragmatic coalitions as a strategy to secure legislative support and reduce opposition, though this posed challenges in party coordination, decision-making efficiency, and legislative oversight. This research employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of political phenomena through observation and empirical data analysis. The findings indicate that the formation of large coalitions is strategic and inclusive, yet requires proper management mechanisms to maintain effective checks and balances

Keywords : Political Coalition, SBY, Jokowi, Prabowo Subianto

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Masa Reformasi membawa perubahan signifikan dengan membatasi kewenangan konstitusional presiden. Setelah adanya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ruang lingkup kekuasaan presiden menjadi lebih sempit dan terkontrol dibandingkan era sebelum reformasi.¹ Dalam praktiknya, dua presiden Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), sama-sama berhasil menjabat hingga dua periode. SBY menuntaskan masa jabatan pertama dan keduanya, sedangkan Presiden Jokowi juga tengah menyelesaikan periode keduanya yang merupakan akhir dari kepemimpinannya. Fakta ini memperlihatkan kokohnya sistem presidensial yang dipertegas melalui Amandemen UUD 1945 yang dilakukan selama kurun waktu 1999 hingga 2002.

Setelah dilakukannya Amandemen UUD 1945, muncul optimisme bahwa presiden di masa mendatang akan memiliki legitimasi yang lebih kuat, sementara rakyat memperoleh ruang yang lebih luas untuk menentukan serta menilai langsung calon pemimpinnya. Mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan dasar legitimasi politik yang kokoh bagi seorang presiden. Oleh karena itu, presiden tidak seharusnya bergantung pada dukungan fraksi-fraksi politik di DPR, mengingat hasil perubahan UUD 1945 juga menegaskan bahwa presiden tidak dapat dengan mudah dijatuhkan oleh lembaga legislatif. Dengan adanya Pilpres, setiap warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan penilaian sekaligus pilihan terhadap calon presiden, sehingga memperkuat relasi antara presiden dan masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain.

Namun, potensi terjadinya kembali konflik serta ketegangan politik dalam hubungan antara Presiden dan DPR masih cukup besar. Oleh karena itu, pembentukan koalisi yang luas kembali dianggap sebagai solusi. Belajar dari pengalaman pemerintahan SBY, Presiden Jokowi pada akhirnya bersedia mengubah komitmennya mengenai koalisi tanpa syarat dengan menerima bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar dalam barisan pendukung pemerintah. Bahkan, pada periode keduanya, Presiden Jokowi

¹ Dadang Supriatna, et al, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Sumedang: Alqaprint, 2025).

turut mengajak Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi lawan politik pada Pilpres 2019 untuk masuk dalam lingkaran pemerintahan.

Fenomena politik yang terbilang unik tampak ketika Presiden Jokowi merangkul Partai Gerindra untuk bersama-sama memperkuat persatuan nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintahannya. Selanjutnya, koalisi pemerintahan juga diperluas dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga barisan pendukung pemerintah semakin gemuk. Kondisi ini membuat partai oposisi hanya tersisa dua, yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 104 kursi atau sekitar 18,1 persen dari total kursi parlemen.²

Langkah politik yang bersifat pragmatis muncul sebagai konsekuensi dari perubahan UUD 1945 yang justru menambah titik persinggungan antara kedua lembaga negara tersebut. Meskipun demikian, arah keseimbangan kekuasaan lebih cenderung berpihak kepada DPR, sehingga proses pemurnian pasca amandemen tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan nuansa parlementer dalam praktik sistem presidensial di Indonesia. Di sisi lain, pilihan untuk menggabungkan sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial terbukti menimbulkan potensi bahaya terhadap stabilitas politik maupun jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, muncul argumen yang menekankan pentingnya pembentukan koalisi besar sebagai sarana untuk menjaga kestabilan dukungan politik di parlemen. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa partai-partai yang tidak terlibat dalam koalisi berpeluang membentuk kekuatan oposisi. Kekhawatiran semacam ini diyakini melekat dalam pertimbangan dua pemimpin yang terpilih langsung melalui mekanisme Pemilihan Presiden.

Bagi Presiden SBY maupun Presiden Jokowi, dukungan dari partai-partai politik yang dominan di pemerintahan serta parlemen menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan dalam praktik sistem presidensial. Keduanya menyadari masih menghadapi persoalan terkait kebutuhan akan sokongan politik, sebab partai pengusung pemerintah tidak menguasai kursi mayoritas absolut di parlemen. Dengan semakin kuatnya peran DPR pada era Reformasi, sementara presiden tidak ditopang oleh satu partai dengan dominasi penuh, maka model kepemimpinan dan strategi pengelolaan pemerintahan dibangun melalui pembentukan koalisi besar yang bersifat inklusif dan gemuk.

Konfigurasi politik kepartaian terbukti memberikan pengaruh besar terhadap ketidakstabilan sistem presidensial, terutama akibat hadirnya sistem multipartai yang sangat ekstrem dan terpecah-pecah. Kondisi ini semakin diperparah dengan praktik politik yang tidak rasional dari partai-partai dalam membangun koalisi. Akibatnya, sepanjang satu dekade kepemimpinan SBY, posisi presiden kerap terlihat lemah dan terjepit dalam dinamika pertarungan antarpartai di parlemen. Seiring waktu, gaya kepemimpinan politik SBY dalam mengelola pemerintahan semakin memperlihatkan keterbatasan dalam menghadapi tekanan politik yang muncul dari sistem multipartai tersebut.

Pada tahun-tahun awal kepemimpinannya hingga lebih dari delapan tahun berjalannya pemerintahan saat ini, posisi Presiden Jokowi sering dipandang penuh dilema. Hal ini disebabkan karena ia bukanlah tokoh utama partai politik, melainkan hanya dianggap sebagai "petugas partai". Kondisi tersebut membuat Jokowi harus menghadapi kenyataan sulit, yakni dukungan dari partai asalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), tidak sepenuhnya solid. Bahkan, PDI Perjuangan yang seharusnya menjadi penopang utama justru kerap mengambil peran sebagai mitra kritis terhadap pemerintah, suatu keadaan yang dapat disebut sebagai anomali.

Pemerintahan Jokowi berupaya mengatasi tantangan terkait citra kepemimpinan yang dinilai rapuh dengan memperkuat karakter pemerintahannya. Salah satu langkah yang ditempuh Presiden Jokowi adalah memperluas basis koalisi pendukung. Sejumlah partai politik yang sebelumnya berada di kubu oposisi akhirnya beralih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dinamika bertambahnya dukungan politik tersebut erat kaitannya dengan praktik pembagian kursi jabatan, yang dipandang sebagai strategi untuk memastikan stabilitas kekuasaan, khususnya dalam menjalin hubungan dengan DPR. Konsekuensinya, jumlah kementerian tetap dipertahankan,

² I Made Halmadiningrat & Aridiva Firdharizki, "Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Dan Akibatnya Terhadap Perlindungan Lingkungan Pada Hak Masyarakat Adat Di Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9.2 (2023): 345–386, <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.601>.

namun posisi wakil menteri diperbanyak sebagai bentuk akomodasi terhadap dukungan politik dari berbagai partai.

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memusatkan kajian pada pertanyaan utama:

1. Bagaimana dinamika pengaturan koalisi politik dijalankan pada era kepemimpinan SBY, kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi, hingga pada periode pemerintahan Prabowo Subianto sekarang?
2. Alasan di balik kecenderungan Pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto untuk memperbesar lingkup koalisi partai politik yang mendukung jalannya pemerintahan mereka?

B. LITERATURE REVIEW

1. Partai Politik

Berbagai ahli telah memberikan pandangannya mengenai pengertian partai politik. Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok individu yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi para pemimpinnya. Selain itu, melalui penguasaan tersebut, anggota partai diharapkan memperoleh keuntungan baik secara ideal maupun material. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa partai politik merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan serupa untuk memperoleh serta menjaga kekuasaan dalam suatu wadah yang disebut partai politik. Akan tetapi, tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila budaya politik di dalam partai bersifat partisipatif. Sebaliknya, tanpa adanya kerja sama yang solid, cita-cita partai politik sulit untuk terwujud karena setiap anggota akan cenderung berjalan sendiri-sendiri.³

Menurut Sartori, partai politik memiliki peranan penting dalam menempatkan kader-kadernya pada jabatan publik. Ia menjelaskan bahwa partai politik merupakan kelompok yang ikut serta dalam pemilihan umum dan melalui mekanisme tersebut dapat mengajukan kandidatnya untuk menduduki posisi-posisi pemerintahan.⁴ Secara umum, para ahli memiliki kesamaan pandangan dalam mendefinisikan partai politik. Riswanda menyebutkan bahwa kesamaan ciri partai politik dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya sekelompok individu yang memiliki kesamaan gagasan serta berusaha mewujudkan gagasan tersebut. Kedua, terbentuknya suatu organisasi yang terstruktur dengan baik dan menjalankan aktivitas secara berkelanjutan sepanjang tahun. Ketiga, adanya upaya dalam merumuskan agenda kebijakan sekaligus memengaruhi proses pengambilan keputusan atas agenda itu. Keempat, terdapat dorongan untuk menempatkan para wakilnya di lembaga pemerintahan guna merealisasikan gagasan yang diperjuangkan.⁵

2. Koalisi Partai Politik

Kajian mengenai koalisi partai politik telah berkembang cukup lama di berbagai negara yang menganut sistem parlementer. Arend menjelaskan bahwa koalisi partai politik dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama dari kelompok individu yang berinteraksi dan dibentuk secara mandiri di luar struktur organisasi resmi. Koalisi tersebut terdiri atas anggota yang dianggap saling memberi keuntungan, berorientasi pada isu atau persoalan tertentu, berfokus pada tujuan di luar kepentingan internal koalisi, serta menuntut adanya tindakan bersama dari para anggotanya.⁶

³ Ibnu Alwaton Surya Waliden, "Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025).

⁴ Naufal Muzaki Setiawan, "Institusionalisasi Partai Golkar Banten Dalam Infusi Nilai Dan Reifikasi Di Masa Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023), <https://eprints.untirta.ac.id/22526/>.

⁵ Mochamat Nurdin, "Presidensial Yang Kompromistis (Studi Presidensialisme Reduktif Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono)," *Jurnal Ilimiha Administrasita* 2.2 (2013): 31–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v2i2.212>.

⁶ Maria Dasilva Lel'uf, et al, "Penerapan Marketing Mix Partai Koalisi Dalam Memenangkan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020," *Jurnal Poros Politik* 4.2 (2022): 13–20, <https://doi.org/10.32938/jpp.v4i2.2542>.

Dalam konteks politik, koalisi dipahami sebagai penyatuan dua atau lebih partai politik yang memiliki tujuan bersama untuk membentuk suatu pemerintahan. Dalam sistem presidensial yang bercirikan multipartai, Bambang Cipto menegaskan bahwa keberadaan koalisi merupakan suatu keharusan demi terciptanya pemerintahan yang stabil. Esensi dari koalisi itu sendiri adalah membangun pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomous*), serta mampu bertahan dalam jangka panjang (*durable*).⁷

Pemerintahan yang dikategorikan kuat dapat dipahami sebagai pemerintahan yang memiliki kemampuan merumuskan sekaligus menjalankan kebijakan tanpa harus khawatir menghadapi penolakan maupun resistensi dari lembaga legislatif. Hingga saat ini, pola koalisi antarpolitical politik belum ada yang benar-benar ideal, sebab tidak satu pun aliansi yang dibentuk para elit mampu menghasilkan keserasian sebagaimana tujuan awalnya. Model koalisi yang umum dijumpai seringkali menimbulkan kerumitan, karena adanya keterkaitan antara kekuatan politik, aktor, serta ideologi yang membuatnya semakin sulit dipahami. Dari sisi teori, kerja sama antarpolitical hanya dapat berlangsung apabila didirikan di atas dasar pemikiran yang rasional dan dapat diterapkan.

Menurut Efriza dalam karyanya *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, yang merujuk pada teori Arend Lijphart, dijelaskan secara rinci berbagai tipe koalisi yang dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya, antara lain:⁸

a. Koalisi Berbasis Ideologi

Teori koalisi yang berlandaskan ideologi menekankan bahwa kesesuaian ideologi serta arah kebijakan antarpolitical menjadi faktor utama dalam pembentukan koalisi. Menurut Ambardi, teori ini beranggapan bahwa para aktor politik cenderung berusaha meninggalkan warisan berupa jejak ideologis maupun kebijakan partai dalam praktik pemerintahan.⁹ Seorang politikus tidak memandang posisi kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai instrumen untuk menjalankan kebijakan tertentu.

Dorongan utama yang melatarbelakanginya adalah upaya memilih sekaligus mempertahankan kebijakan yang dianggap paling tepat, sehingga ikatan ideologis menjadi landasan utama dalam membangun koalisi. Dengan demikian, ukuran besar atau kecilnya koalisi bukanlah tolok ukur utama dalam menentukan apakah sebuah partai dirangkul atau dikesampingkan. Yang lebih esensial adalah bagaimana koalisi mampu membentuk pemerintahan yang solid. Dalam kerangka ini, partai politik berperan sebagai penghubung transisi.¹⁰

b. Koalisi dengan Jumlah Kemenangan Minimum

Teori ini menjelaskan bahwa prinsip utama dari pembentukan koalisi adalah upaya untuk memaksimalkan kekuasaan dan memperoleh sebanyak mungkin posisi dalam pemerintahan. Menurut teori kemenangan minimal, tujuan utama partai adalah dapat duduk dalam pemerintahan karena hal tersebut memberikan keuntungan politik maupun material bagi para anggota koalisi. Caranya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin partai yang memiliki kursi di kabinet dan tidak memasukkan partai yang tidak dibutuhkan ke dalam koalisi. Teori ini menekankan membentuk aliansi sampai mencapai mayoritas suara (50% + 1). Biasanya proses penambahan mitra dihentikan ketika proporsi kursi parlemen sudah melewati 50%.

Ambardi, menyatakan bahwa para anggota koalisi cenderung membentuk koalisi dengan jumlah minimum yang diperlukan untuk memastikan kemenangan dalam persaingan politik, tanpa menambahkan anggota lebih banyak. Dengan cara ini,

⁷ Masdiyanti Putri & Zuly Qodir, "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015," *Journal of Governance and Public Policy* 4.1 (2017): 142–173, <https://doi.org/10.18196/jgpp.4174>.

⁸ Dwi Gustina Wati, "Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

⁹ Eduard Awang Maha Putra et al., "Penguatan Ideologi Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance* 9.2 (2024): 423–449, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art8>.

¹⁰ Muhammad Hilmi Naufal Aflah & Arif Hidayat, "Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil," *PUSKAPSI Law Review* 5.1 (2025): 155–179, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53743>.

keuntungan politik yang diperoleh dapat dibagi secara optimal di antara anggota koalisi. Singkatnya, fokus utama peserta koalisi adalah memperoleh jumlah suara yang cukup untuk memenangkan kontestasi politik.¹¹

c. *Minimum Size Coalition*

Partai yang memperoleh suara terbanyak biasanya akan menjalin kerjasama dengan partai-partai yang lebih kecil untuk memastikan tercapainya mayoritas suara.

d. *Minimal Range Coalition*

Pelaksanaan koalisi ini bertumpu pada kesamaan kecenderungan ideologi, sehingga mempermudah partai-partai untuk bekerja sama membentuk kabinet dalam pemerintahan.

e. *Bargaining Proposition*

Koalisi ini terdiri dari jumlah partai yang paling minimal, dengan tujuan mempermudah jalannya negosiasi dalam pemerintahan maupun dalam perumusan kebijakan. Teori ini diterapkan untuk memfasilitasi proses tawar-menawar, karena jumlah anggota atau mitra koalisi yang terbatas membuat negosiasi menjadi lebih efisien.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam kenyataan empiris serta lebih menekankan pada pengamatan dan eksplorasi perilaku subjek penelitian. Saryono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau keunikan suatu pengaruh sosial yang sulit diukur, dijelaskan, atau digambarkan melalui metode penelitian lain.¹² Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari fenomena dalam kondisi alami objek yang diteliti, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian.¹³

Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Proses ini dilakukan melalui deskripsi verbal dan bahasa, dalam konteks yang alami, dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang sesuai dengan lingkungan objek tersebut.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang terperinci, sehingga menekankan pentingnya kualitas dan ketelitian data yang dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, semakin rinci dan cermat data yang diperoleh, semakin tinggi pula kualitas penelitian tersebut. Selain itu, penelitian kualitatif juga dirancang untuk memperoleh informasi yang aktual secara lengkap serta menggambarkan realitas yang ada.¹⁵

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pengaturan Koalisi Politik yang Dijalankan pada Era Kepemimpinan SBY, Jokowi, dan Pemerintahan Prabowo Subianto

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinamika pengaturan koalisi politik mencerminkan karakteristik khas dalam sistem presidensial Indonesia. SBY memimpin dua periode (2004–2009 dan 2009–2014) dengan membentuk koalisi multipartai yang solid di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat sebagai partai utama bersama sejumlah partai lain, termasuk PKS, PAN, PPP, PKB, dan PBR, yang dikenal sebagai Koalisi Kerakyatan pada periode pertama. Pada periode kedua, koalisi ini lebih besar dan

¹¹ Dimas Subekti, *Hambarnya Kekuatan Politik Islam Indonesia: Pengalaman Kompetisi Elektoral Partai Politik Islam Selama Era Reformasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023).

¹² Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Edisi 2, C (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁴ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

mencakup partai-partai seperti Golkar, NasDem, dan Hanura, sementara PDI-P menjadi oposisi utama.¹⁶

Dinamika koalisi SBY dipengaruhi oleh pragmatisme politik yang tinggi. Partai-partai politik sering kali bergabung atau keluar dari koalisi berdasarkan pertimbangan kepentingan jangka pendek, seperti pengaruh dalam kabinet atau akses terhadap kebijakan publik. Hal ini menyebabkan koalisi yang dibentuk tidak selalu stabil dan sering kali mengalami pergeseran, baik dalam komposisi maupun arah politiknya.¹⁷

Selain itu, pengaturan koalisi SBY juga mencerminkan tantangan dalam sistem presidensial Indonesia, di mana meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, hubungan dengan DPR tetap penting. Koalisi yang kuat di DPR diharapkan dapat mendukung agenda pemerintah, namun kenyataannya, koalisi yang gemuk sering kali menimbulkan ketegangan politik dan mempengaruhi efektivitas pengawasan legislatif.¹⁸

Sementara itu, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pengaturan koalisi partai politik mencerminkan strategi adaptif dalam menghadapi sistem presidensial multipartai yang kompleks. Sejak Pemilu 2014, Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang terdiri dari PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKPI. Koalisi ini bertujuan untuk memperoleh mayoritas legislatif guna mendukung agenda pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika politik menyebabkan pergeseran aliansi, dengan beberapa partai keluar dari koalisi dan membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi.¹⁹

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Jokowi menerapkan strategi koalisi yang fleksibel dan pragmatis. Pemerintahannya cenderung memperluas koalisi dengan mengakomodasi partai-partai politik di luar pemerintahan, seperti Gerindra dan Partai Demokrat, untuk memperoleh dukungan legislatif yang lebih luas. Langkah ini menunjukkan bahwa koalisi tidak selalu dibentuk berdasarkan ideologi, melainkan lebih pada pertimbangan pragmatis untuk mencapai tujuan politik tertentu.²⁰

Selain itu, Jokowi juga memperkuat konsolidasi internal dengan memberikan posisi strategis kepada partai-partai pendukung melalui pembagian jabatan di kabinet dan lembaga negara. Misalnya, pembentukan jabatan wakil menteri dan pemberian kursi di lembaga-lembaga penting menjadi salah satu cara untuk menjaga loyalitas partai-partai koalisi. Namun, strategi ini juga menimbulkan kritik terkait dengan potensi pemborosan anggaran dan kurangnya efisiensi birokrasi.²¹

Kemudian di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan yang strategis dan pragmatis dalam membangun konsolidasi politik pasca Pemilu 2024. Setelah terpilih, Prabowo membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang terdiri dari 10 partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan beberapa partai lainnya. Koalisi ini menguasai sekitar 81% kursi di DPR, memberikan kontrol legislatif yang signifikan bagi pemerintahannya.²²

Untuk memastikan stabilitas politik, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih yang beranggotakan 123 orang, menjadikannya kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-

¹⁶ Suparto, "Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia," *Sasi* 27.4 (2021): 516–531, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>.

¹⁷ Ahmad Siboy, "Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan," *Perspektif Hukum* 1.1 (2021): 36–58, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/17>.

¹⁸ Veri Junaidi & Viola Reininda, "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai," *Jurnal JENTERA* 3.1 (2020): 216–239, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

¹⁹ Idul Rishan, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.2 (2020): 219–240, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.

²⁰ Sanny Elsa Situmorang, "Analisis Koalisi Partai Politik Dalam Pengusungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" (Universitas Jambi, 2025), <https://repository.unja.ac.id/78583/>.

²¹ Febrian Mulyadi Angsemin, "Konsolidasi Kekuasaan Dan Tantangan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Joko Widodo: Antara Pembangunan Ekonomi Dan Stabilitas Politik," *Journal Akademika* 24.1 (2024): 78–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31385/jakad.v24i1.34>.

²² Achmad Fachrudin, *Rahasia Di Balik Kemenangan Pram Doel Di Pilgub DKI 2024* (Media Kalam, 2025).

Reformasi. Namun, meskipun kabinet besar ini bertujuan menjaga loyalitas koalisi, beberapa kementerian mengalami pemotongan anggaran, sementara fungsi eksekutif dialihkan ke lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali langsung Presiden.

Pendekatan ini mencerminkan upaya Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan meminimalkan oposisi, meskipun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai lemahnya pengawasan legislatif dan potensi otoritarianisme dalam pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Prabowo menawarkan KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintahan hingga 2029, sebagai langkah strategis untuk memastikan kesinambungan politik dan mengantisipasi tantangan dalam Pemilu 2029.²³

2. Kecenderungan Pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto untuk Memperbesar Lingkup Koalisi Partai Politik

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan kecenderungan untuk memperbesar lingkup koalisi partai politik guna memastikan stabilitas politik dan dukungan legislatif yang kuat. Hal ini tercermin dalam pembentukan Koalisi Kerakyatan pada Pemilu 2004, yang melibatkan Partai Demokrat, PKS, PBR, PPP, PAN, dan PKB untuk mendukung pasangan SBY-Jusuf Kalla. Koalisi ini bertujuan untuk mengamankan dukungan di parlemen dan menciptakan pemerintahan yang stabil.²⁴

Pada periode kedua pemerintahannya (2009–2014), SBY memperluas koalisinya dengan mengajak Partai Golkar bergabung setelah pemilu selesai. Langkah ini menunjukkan pendekatan pragmatisme politik, di mana SBY berusaha membangun mayoritas legislatif yang solid untuk mendukung agenda pemerintahannya.²⁵ Namun, perlu dicatat bahwa koalisi yang besar ini juga membawa tantangan, seperti kesulitan dalam mengatur kedisiplinan partai-partai koalisi dan potensi tawar-menawar kepentingan politik. Meskipun demikian, SBY cenderung memilih untuk memperbesar koalisi guna memastikan dukungan yang kuat dan stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, dalam Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan kecenderungan untuk memperbesar lingkup koalisi partai politik sebagai strategi untuk memastikan stabilitas politik dan kelancaran implementasi kebijakan. Dalam sistem presidensial Indonesia yang menganut sistem multipartai, koalisi menjadi penting untuk memperoleh dukungan legislatif yang diperlukan dalam proses legislasi dan pengawasan. Pada periode pertama dan kedua kepemimpinannya, Jokowi membentuk koalisi yang luas dengan melibatkan berbagai partai politik, termasuk yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, seperti Partai Gerindra yang bergabung setelah Pilpres 2019.²⁶

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif serta mengurangi potensi oposisi yang dapat menghambat agenda pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa koalisi yang besar juga membawa tantangan, seperti potensi ketidakefektifan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang lemah terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperluas koalisi untuk memperoleh dukungan politik dan memastikan bahwa fungsi checks and balances tetap berjalan dengan baik.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan kuat untuk memperbesar lingkup koalisi partai politik guna memastikan stabilitas politik dan kontrol legislatif yang solid. Setelah terpilih pada Pilpres 2024, Prabowo membentuk kabinet dengan melibatkan berbagai partai politik, menciptakan koalisi yang luas dan dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kemudian diperluas menjadi KIM Plus dengan tambahan partai seperti PKB dan

²³ Christo Sumurung Tua Sagala, “Dinamika Koalisi Politik Di Balik Demokrasi Keindonesiaan: Oposisi Menjadi Ancaman?,” *Veritas et Justitia* 11.1 (2025): 171–197, <https://doi.org/10.25123/8m5vak97>.

²⁴ Aisah Putri Budiatri et al., *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

²⁵ Salvatore Simarmata, *Media Dan Politik: Sikap Pers Terhadap Pemerintahan Koalisi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

²⁶ Abdul Haris Fatgehipon, *Hubungan Sipil Dan Militer Era Presiden Joko Widodo* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

NasDem. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan persatuan nasional yang kuat dan menghindari fragmentasi politik yang dapat menghambat agenda pemerintahan.²⁷

Prabowo juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen yang akan mendukung pemerintahannya hingga Pilpres 2029. Inisiatif ini disambut positif oleh beberapa partai, termasuk PKB, yang menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam koalisi permanen tersebut. Namun, langkah ini juga menuai kritik dari beberapa kalangan yang menilai bahwa koalisi yang terlalu besar dapat mengurangi fungsi pengawasan DPR dan meningkatkan potensi dominasi eksekutif atas legislatif.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto memiliki kecenderungan untuk memperbesar lingkup koalisi partai politik sebagai strategi untuk memastikan stabilitas politik dan dukungan legislatif yang kuat. SBY mengembangkan koalisi pragmatis untuk memperoleh mayoritas di DPR dan mendukung agenda pemerintahannya, meskipun koalisi yang besar menimbulkan tantangan terkait kedisiplinan partai dan potensi tawar-menawar politik. Jokowi juga menerapkan strategi koalisi yang fleksibel dengan melibatkan partai-partai di luar pemerintahan guna menjaga kelancaran implementasi kebijakan, namun koalisi yang luas dapat menimbulkan risiko ketidakefektifan pengambilan keputusan dan lemahnya pengawasan. Pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan upaya memperluas koalisi melalui KIM Plus untuk mengamankan kontrol legislatif dan stabilitas politik, termasuk inisiatif koalisi permanen hingga Pilpres 2029, meskipun hal ini menimbulkan kritik terkait potensi dominasi eksekutif dan lemahnya fungsi DPR.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan antara perluasan koalisi dan efektivitas fungsi legislatif. Koalisi yang luas sebaiknya dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang jelas dan disiplin internal antarpolisi untuk mengurangi konflik kepentingan serta menjaga stabilitas pemerintahan. Selain itu, perluasan koalisi tidak boleh mengorbankan efisiensi pengambilan keputusan, transparansi anggaran, dan kualitas pengawasan kebijakan, sehingga pemerintahan tetap mampu melaksanakan agenda pembangunan secara optimal. Evaluasi berkala terhadap struktur dan anggota koalisi juga penting dilakukan untuk menyesuaikan dinamika politik serta mempersiapkan tantangan legislatif dan Pemilu di masa mendatang, sehingga koalisi tetap efektif dan berkelanjutan.

²⁷ Adinda Eka Rahayu et al., “Pancasila Dan Good Governance: Strategi Memperkuat Akuntabilitas Publik Dalam Konteks Politik Identitas,” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 13.1 (2024): 69–95, <https://doi.org/10.33061/jgz.v13i1.10803>.

REFERENSI

- Aflah, Muhammad Hilmi Naufal, and Arif Hidayat. "Dominant Coalition Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil." *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 1 (2025): 155–79. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53743>.
- Angsemin, Febrian Mulyadi. "Konsolidasi Kekuasaan Dan Tantangan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Joko Widodo: Antara Pembangunan Ekonomi Dan Stabilitas Politik." *Journal Akademika* 24, no. 1 (2024): 78–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31385/jakad.v24i1.34>.
- Budiatri, Aisah Putri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanafi. *Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Fachrudin, Achmad. *Rahasia Di Balik Kemenangan Pram Doel Di Pilgub DKI 2024*. Media Kalam, 2025.
- Fatgehipon, Abdul Haris. *Hubungan Sipil Dan Militer Era Presiden Joko Widodo*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Halmadiningrat, I Made, and Aridiva Firdharizki. "Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Dan Akibatnya Terhadap Perlindungan Lingkungan Pada Hak Masyarakat Adat Di Kalimantan Timur." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 345–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.601>.
- Junaidi, Veri, and Viola Reininda. "Relasi Presiden Dan DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jurnal JENTERA* 3, no. 1 (2020): 216–39. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.
- Lel'uf, Maria Dasilva, Dian Festianto, and Marisa S. B. Seran. "Penerapan Marketing Mix Partai Koalisi Dalam Memenangkan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020." *Jurnal Poros Politik* 4, no. 2 (2022): 13–20. <https://doi.org/10.32938/jpp.v4i2.2542>.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nurdin, Mochamat. "Presidensial Yang Kompromistis (Studi Presidensialisme Reduktif Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono)." *Jurnal Ilimiha Administrasita' 2*, no. 2 (2013): 31–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v2i2.212>.
- Putra, Eduard Awang Maha, Lalu Aria Nata Kusuma, Fahrurrozi Iman Jayadi Syahid, and Novia Salfat Anggraini. "Penguatan Ideologi Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 423–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art8>.
- Putri, Masdiyan, and Zuly Qodir. "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim Dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015." *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 1 (2017): 142–73. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4174>.
- Rahayu, Adinda Eka, Mohammad Afrizal Rizky Setyawan, Sulthonika Mahfudz Al Mujahidin, and M. Asif Nur Fauzi. "Pancasila Dan Good Governance: Strategi Memperkuat Akuntabilitas Publik Dalam Konteks Politik Identitas." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 13, no. 1 (2024): 69–95. <https://doi.org/10.33061/jgz.v13i1.10803>.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 219–40. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Sagala, Christo Sumurung Tua. "Dinamika Koalisi Politik Di Balik Demokrasi Keindonesiaan: Oposisi Menjadi Ancaman?" *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 171–97. <https://doi.org/10.25123/8m5vak97>.
- Setiawan, Naufal Muzaki. "Institusionalisasi Partai Golkar Banten Dalam Infusi Nilai Dan Reifikasi Di Masa Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023. <https://eprints.untirta.ac.id/22526/>.
- Siboy, Ahmad. "Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan." *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2021): 36–58. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/17>.
- Simarmata, Salvatore. *Media Dan Politik: Sikap Pers Terhadap Pemerintahan Koalisi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Situmorang, Sanny Elsa. "Analisis Koalisi Partai Politik Dalam Pengusungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024."

- Universitas Jambi, 2025. <https://repository.unja.ac.id/78583/>.
- Subekti, Dimas. *Hambarnya Kekuatan Politik Islam Indonesia: Pengalaman Kompetisi Elektoral Partai Politik Islam Selama Era Reformasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edisi 2, C. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulistiyono, Urip. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Suparto. "Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 4 (2021): 516–31. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.600>.
- Supriatna, Dadang, Udayana Madjid, and Ismail. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sumedang: Alqaprint, 2025.
- Waliden, Ibnu Alwatan Surya. "Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.
- Wati, Dwi Gustina. "Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.